

DISERTASI

**PENERAPAN ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS PADA UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF SYSTEMATIC SPECIFICITY TO
THE CUSTOMS CRIMINAL ACT IN CORRUPTION CASES***



Oleh :

**Yuliana Setiadi
202002026102**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS PADA UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF SYSTEMATIC SPECIFICITY TO
THE CUSTOMS CRIMINAL ACT IN CORRUPTION CASES***

Disusun Oleh:

Yuliana Setiadi

202002026102

Telah Disetujui untuk Melaksanakan: Ujian Terbuka

Pada Tanggal _____ :

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Pemikiran.....	17
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II Kajian Teoretis Tentang Tindak Pidana Kepabeanaan Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Perbandingan	25
A. Teori Keadilan (John Rawls).....	25
B. Asas Preferensi Hukum	32
C. Teori Integratif.....	35
D. Pengertian, Ruang Lingkup, Dan Kualifikasi Tindak Pidana Kepabeanaan Dan Tindak Pidana Korupsi.....	40
E. Pengertian, Pengaturan Dan Kriteria Asas <i>Lex Specialis Systematic</i>	64
BAB III Kedudukan Dan Pengaturan Asas Kekhususan Sistematis (<i>Lex Specialis Systematic</i>) Dalam Tindak Pidana Kepabeanaan dan Tindak Pidana Korupsi	74

A. Kedudukan Asas <i>Lex Specialis Systematic</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia	74
B. Titik Singgung Asas <i>Lex Specialis Systematic</i> Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Dan Tindak Pidana Korupsi	81
C. Tindak Pidana Kepabeanan Sebagai <i>Lex Specialis Systematic</i>	85
D. Perbandingan Sistem Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Dan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Belanda dan Amerika	97

BAB IV Praktik Perkara Tindak Pidana Kepabeanan Dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan 104

A. Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan.....	104
B. Reformulasi Asas Kekhususan Sistematis Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Masa Mendatang.....	151

BAB V Penutup..... 226

A. Kesimpulan	226
B. Saran	226

DAFTAR PUSTAKA..... 228

ABSTRAK

Judul Disertasi : Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kata Kunci : Asas Kekhususan Sistematis, Tindak Pidana Kepabeanan, Tindak Pidana Korupsi.

Problematika konflik norma pada Undang-Undang tindak pidana kepabeanan yang diambil alih menjadi perkara tindak pidana korupsi. Kedua Undang-Undang ini sama-sama bersifat khusus, namun kekhususan sistematis tidak diterapkan dalam UU tindak pidana kepabeanan. Penelitian ini untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan penerapan asas kekhususan sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan kemudian mengkaji, menganalisis dan menemukan reformulasi asas kekhususan sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan dalam perkara tindak pidana korupsi masa mendatang.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun kerangka penelitian pada penelitian ini adalah Teori Keadilan (*Grand Theory*), Asas Preferensi Hukum (*Middle Range Theory*) dan Teori Integratif (*Applied Theory*).

Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan asas kekhususan sistematis tidak diterapkan secara limitatif dan konsisten dalam tindak pidana kepabeanan. Hal ini disebabkan pengabaian ketentuan norma Pasal 14 UU Tipikor. Belum jelas kedudukan, parameter dan konsep asas kekhususan sistematis. Belum ada kesamaan sikap, sinergitas dan polarisasi pemikiran dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Reformulasi asas kekhususan sistematis dalam tindak pidana kepabeanan merupakan *derivate* asas *lex specialis derogate legi generali*. Agar asas kekhususan sistematis tidak menimbulkan multitafsir dan menjadi jelas kedudukan, parameter dan konsepnya maka diperlukan ada reformulasi penambahan ayat 3 pada ketentuan Pasal 63 KUHP dengan redaksional yang menyatakan, "jika dua perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang khusus maka berlaku suatu aturan pidana yang khusus dengan disertai syarat-syarat kekhususan sistematis sebagai parameter penerapan". Asas kekhususan sistematis bersyarat perlu dicermati subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan *area delicti* berada dari para penegak hukum.

ABSTRACT

Title : *Application of the Principle of Systematic Specificity to the Customs Criminal Act in Corruption Cases*

Keywords : *Systematic Specificity Principle, Customs Crime, Corruption Crime.*

The problem of the conflict of norms in the Customs Crime Act which was taken over became a case of corruption. These two laws are both special in nature, but the systematic specificity is not applied in the Customs Crime Act. This research is to examine, analyze and find the application of the principle of systematic specificity in the Customs Criminal Act and then to examine, analyze and find the reformulation of the systematic specificity principle in the Customs Criminal Act in future corruption cases.

This research was carried out using a normative juridical approach, a statutory approach, a conceptual approach, using primary, secondary and tertiary legal sources. The research framework in this study is the theory of justice (Grand Theory), the principle of legal preference (Middle Range Theory) and Integrative Theory (Applied Theory).

*The result of this research is that the application of the principle of systematic specificity is not enforced in a limitative and consistent manner within the customs crimes. This is caused from the neglect of Article 14 of the Anti-Corruption Law. It is not clear as to the position, parameter and concept of the systematic specificity principle. There is an absence of a collective attitude, synergy, and polarization of thinking with respect to the handling of corruption cases. The reformulation of systematic specificity principle in customs crimes is the derivative of the *lex specialis derogate legi generali* principle. In order to avoid multi-interpretation to the systematic specificity principle, and to clarify the position, parameters and its concepts, it is thereby necessary to reformulate the addition of paragraph 3 in Article 63 of the Criminal Code which stipulates "if two conducts falls into one specific criminal act, then a specific criminal rule accompanied with its systematic specificity provisions shall apply along with the implementing parameters". The conditional systematic specificity principle must be observed by personal subjects, objects of alleged acts that have been violated, evidence that has been obtained, as well as the environment and the area of delict that is from law enforcers.*